

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Di tengah wabah virus Corona atau Covid-19 di Indonesia berdampak kepada sejumlah aspek kehidupan. Terjadinya ketidakstabilan perekonomian di berbagai negara tak hanya soal kesehatan, penyebaran wabah yang bermula dari Tiongkok ini juga berdampak juga pada aspek ekonomi terutama pada saat di berlakukannya penerapan pembatasan *socialdistancing* dan *lockdown*. Bertambahnya angka pengangguran yang semakin meningkat karena PHK atau diberhentikan sementara akibat masa pandemi ini, sebagian dari masyarakat yang terkena dampak terpaksa kehilangan pekerjaannya termasuk UMKM dan pedagang kecil turut mengalami kesulitan ekonomi (Sembiring, Fauzi., 2020).

Guna mencegah krisis ekonomi maka pemerintah memberikan stimulus kepada masyarakat yang terdampak berupa bantuan sosial untuk meringankan biaya hidup sehari-hari dengan memberikan bantuan sosial berupa bantuan uang tunai maupun non tunai kepada masyarakat. Dan pemerintah sudah mempersiapkan akan memberikan bantuan khusus bagi masyarakat yang terpapar dampak virus covid-19 guna meminimalisir pengeluaran masyarakat dimasa pandemi ini. Selain itu, dilansir dari situs resmi Sekretariat kabinet, bahwa bagi masyarakat Bayang akan diberikan bantuan sosial tunai. Dimana pemerintah melibatkan 43.346 jiwa, diutamakan masyarakat yang belum menerima bansos apapun, dengan bantuan uang senilai Rp600.000/bulan dengan jangka waktu 3 bulan dimana anggaran yang disiapkan sebesar Rp.78,2miliar.

Namun berjalannya program tersebut di lapangan ternyata tak sesuai ekspektasi, dana bantuan sosial tersebut tak sesuai harapan masyarakat karena bantuan sosial tersebut dianggap salah sasaran atau tidak tepat sasaran menurut masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya keluhan-kesah dari masyarakat yang memang seharusnya layak mendapat bantuan tetapi tidak menjadi sasaran mendapat bantuan tersebut.

Perlunya mengevaluasi kembali program bantuan yang di berikan pemerintah agar lebih tepat sasaran karena program-program tersebut tidak berjalan sesuai yang dicanangkan sebelumnya oleh pemerintah. Seperti halnya di Desa Bayang, Kab. Pesisir Selatan ini banyak masyarakat yang mengeluh akan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Diduga karena kabupaten/kota atau pihak terkait tidak memperbaharui data kemiskinan atau data masyarakat yang layak menerima bantuan sehingga data menjadi tidak akurat dan dana yang dikucurkan pemerintah pun tidak tepat sasaran.

Beberapa hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan kelemahan dari program ini, yaitu ditemukan kendala dalam penyalurannya sehingga tidak sesuai dengan tujuan utama dari pemberian bantuan covid-19 serta ketepatan sasaran bantuan covid-19, dimana ditemukan masih banyaknya rumah tangga atau warga tidak miskin yang menerima bantuan covid-19. Sasaran penerima bantuan covid-19 masih lemah dimana ditemukan banyak penerima bantuan covid-19 yang bukan berasal dari keluarga miskin dan banyak warga dari keluarga kurang mampu tidak menerima manfaat dari bantuan covid-19 serta masih manualnya cara yang digunakan dalam perangkan penerima bantuan covid-19 tersebut dengan jumlah penerima bantuan covid-19 yang banyak serta indikator kriteria yang banyak. Oleh

karena itu, untuk memperoleh hasil yang lebih baik dan mengatasi masalah tersebut, yaitu dengan mengembangkan suatu aplikasi yang mengimplementasikan metode-metode yang dapat mempermudah dalam pengambilan keputusan serta dapat membantu dalam meningkatkan ketepatan sasaran dari penerima program bantuan covid-19.

Pada penelitian ini penulis mencoba menggunakan metode *Analitycal Hierarchy Process* (AHP) yang mana metode berguna untuk memecahkan suatu situasi yang kompleks tidak terstruktur kedalam beberapa komponen dalam susunan yang hirarki, dengan memberi nilai subjektif tentang pentingnya setiap variabel secara relatif, dan menetapkan variabel mana yang memiliki prioritas paling tinggi guna mempengaruhi hasil pada situasi tersebut(Kristiyanti, 2020).

Proses pengambilan keputusan pada dasarnya adalah memilih suatu alternatif yang terbaik. Seperti melakukan penstrukturan persoalan, penentuan alternatif-alternatif, penetapan nilai kemungkinan untuk variabel aleatori, penetap nilai, persyaratan preferensi terhadap waktu, dan spesifikasi atas resiko. Betapapun melebarnya alternatif yang dapat ditetapkan maupun terperinci nilai kemungkinan, keterbatasan yang tetap melingkupi adalah dasar perbandingan berbentuk suatu kriteria yang tunggal(Jadiaman Parhusip, 2019)

Metode *Analitycal Hierarchy Process* (AHP) dapat membantu dalam pengambilan keputusan suatu kasus, akan tetapi perhitungan menggunakan metode AHP ini hanya menghasilkan nilai terbesar yang akan terpilih sebagai alternatif terbaik. Perhitungan akan sesuai dengan metode ini apabila alternatif yang terpilih memenuhi kriteria yang telah ditentukan(Saefudin & Cahyo, 2019). Metode AHP

ini lebih efisien karena waktu yang dibutuhkan dalam perhitungan lebih singkat(Prabowo & Setiawan, 2019).

Demi terwujudnya sebuah sistem pendukung keputusan yang tepat sasaran dan komputerisasi, dibuatlah sebuah sistem yang mengimplementasikan metode AHP untuk hasil akhir yang diharapkan. Dimana sistem tersebut berjudul **“SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENERIMA BANTUAN COVID-19 MENGGUNAKAN METODE (AHP) ANALITYCAL HIERARCHY PROCESS (STUDI KASUS : KANTOR CAMAT BAYANG)”**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut

1. Apakah dengan sistem pendukung keputusan dalam penyeleksian penerima bantuan covid-19 didapatkan hasil yang akurat dan tepat sasaran?
2. Apakah dengan diterapkannya implementasi metode *Analitycal Hierarchy Process* dapat memberikan informasi yang dapat menentukan keputusan pemberian bantuan covid-19?
3. Bagaimana membangun sebuah sistem dalam mengambil keputusan penerima bantuan covid-19 pada Kantor Camat Bayang dapat dilakukan dengan mudah?

## **1.3 Hipotesis**

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka didapatkan hipotesa sebagai berikut:

1. Dengan adanya sistem pendukung keputusan diharapkan menyeleksi penerima bantuan covid-19 secara akurat dan tepat sasaran.
2. Dengan adanya penerapan metode ini dapat memudahkan pihak Kantor Camat Bayang dalam mendapatkan informasi yang benar dan akurat dalam pemberian bantuan covid-19 serta meminimalisir kesalahan yang ada sebelumnya.
3. Diharapkan dengan diterapkannya sebuah sistem dalam mengambil keputusan penerimaan bantuan covid-19 pada Kantor Camat Bayang dapat dilakukan dengan mudah.

#### **1.4 Batasan Masalah**

Dalam penyusunan tugas akhir ini diberikan batasan masalah agar dalam penjelasannya nanti akan lebih mudah, terarah dan sesuai dengan yang diharapkan.

Batasan tersebut antara lain :

1. Sistem yang akan dirancang dan dibangun adalah sistem pendukung keputusan yang membantu memberikan alternatif terbaik dalam penyeleksian penerimaan bantuan covid-19
2. Penggunaan metode AHP untuk menyeleksi alternatif terbaik agar diperoleh warga atau rumah tangga yang layak mendapatkan bantuan covid-19
3. Merancang sebuah sistem dalam mengambil keputusan penyeleksian penerimaan bantuan covid-19 pada Kantor Camat Bayang.

## **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menghasilkan rancangan sistem pendukung keputusan penyeleksian penerima bantuan covid-19 menggunakan metode AHP agar menjadi lebih terarah dan tepat.
2. Mengetahui hasil implementasi metode AHP pada sistem pendukung keputusan penyeleksian penerima bantuan covid-19 yang akurat
3. Untuk menghasilkan sistem pendukung keputusan yang dibangun agar dapat mempermudah sebuah pengambilan keputusan yang tepat dan akurat

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

1. Manfaat bagi Kantor Camat Bayang

Dengan adanya rancangan sistem pendukung keputusan penerima bantuan covid-19 ini diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada pihak Kantor Camat Bayang dalam menentukan keputusan penerima bantuan covid-19 yang tepat dan akurat.

2. Manfaat bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang mengambil sebuah keputusan penerima bantuan covid-19 dengan terjun langsung kelapangan, sehingga peneliti mengetahui secara langsung situasi yang terjadi dilapangan beserta kendala-kendala yang terjadi.

### 3. Manfaat bagi kampus

Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berupa produk yang dapat bermanfaat.

## **1.7 Gambaran Umum Kantor Camat Bayang**

Gambaran umum merupakan sebuah tinjauan umum yang meliputi beberapa cakupan pada instansi tersebut seperti sejarah berdirinya, visi dan misi, serta tujuan instansi tersebut. Disini penulis akan menjelaskan tentang gambaran umum instansi yang meliputi sejarah, struktur organisasi, visi dan misi, serta tugas dan fungsi dari setiap struktur organisasi

### **1.7.1. Sejarah Kantor Camat Bayang**

Kecamatan Cerenti berdiri pada tahun 1947 pada zaman penjajahan Belanda dengan nama Wali Nagori Bayang,. Sedangkan Kantor Camatnya saat itu masih darurat dengan menyewa rumah masyarakat.

Karena kantor satu atap sudah tidak memadai lagi, Pada tahun 1961 Kantor Wali nagari/ camat pindah ke kantor yang baru yang lokasinya masih di Bayang, Pesisir Selatan, inisiatif pembangunan kantor ini atas prakarsa masyarakat Bayang dengan cara swadaya dan gotong royong. Pada tahun 1961 ini kantor wali nagari resmi menjadi Kantor Camat Bayang

### 1.7.2. Visi dan Misi Kantor Camat Bayang

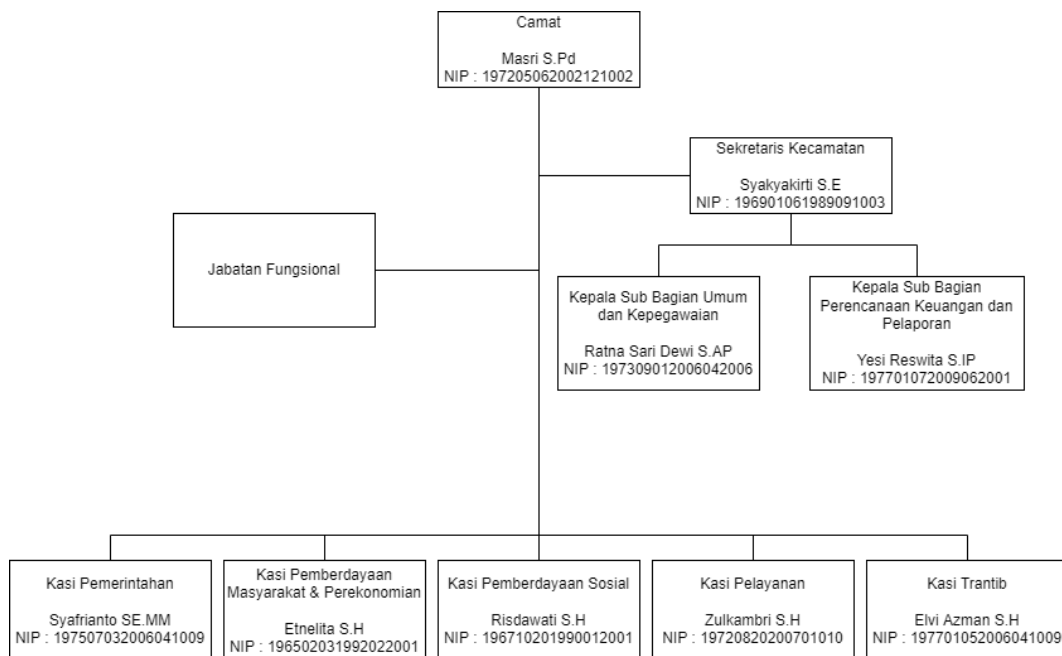
1. Visi

- a. Terwujudnya pelayanan yang prima,transparan dan mengikat hati di kecamatan

2. Misi

- a. Meningkatkan kualitas pegawai kecamatan yang siap dalam segala hal pelayanan,ramah dan berdisiplin tinggi
- b. Menerapkan proses pelayanan yang efektif,efisien dan transparan untuk mencapai hasil yang berkualitas
- c. Menggunakan fasilitas kerja yang tepat guna tercapainya kualitas pelayanan yang optimal

### 1.7.3. Struktur Organisasi



Sumber : Kantor Camat Bayang,Kabupaten Pesisir Seatan,Sumatera Barat

**Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kantor Camat Bayang**



#### **1.7.4. Tugas dan Wewenang**

Adapun tugas dari struktur organisasi adalah sebagai berikut:

1. Camat
  - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
  - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
  - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangan undangan
2. Sekretaris
  - a. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian
  - b. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan,keprotokolandan hubungan Masyarakat
  - c. Penyelenggaraan ketatalaksanaan,kearsipan dan perpustakaan
3. Sub Bagian Umum dan Keuangan
  - a. Menyusun rencana kegiatan dibidang urusan umum dan keuangan;
  - b. Melaksanakan urusan kesektarian;
  - c. Menyimpan, Mengatur dan Memelihara arsip dinas;
4. Sub Bagian Perencanaan
  - a. Penyusunan program kerja diwilayah kecamatan;
  - b. Pengumpulan, pengelolaan dan penganalisan data potensi kecamatan;
  - c. Penyusun rencana strategis dan laporan akuntabilitas kinerja kecamatan;
5. Jabatan Fungsional Umum

- a. Membantu Kepala camat dalam melaksanakan wewenang
  - b. Melaksanakan sebagian tugas dan fungsi camat sesuai dengan keahlian dan keterampilan
  - c. Melaksanakan pelayanan fungsional;
6. Seksi Pemerintahan
- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan;
  - b. Penyusunan program dan kegiatan seksi pemerintahan;
  - c. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan; dan
7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian
- a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
  - b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
  - c. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
8. Seksi Kesejahteraan Rakyat
- a. Melakukan pengumpulan bahan penyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang agama, termasuk urusan haji, serta pendidikan dan kesehatan di kecamatan;

- b. Melakukan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kecamatan;
- c. Melakukan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di kecamatan;

9. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Penyusunan program dan kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban;
- c. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum.

10. Seksi Pelayanan

- a. Mengumpulkan dan mengolah data informasi yang berhubungan dengan seksi pelayanan;
- b. Melaksanakan pelayanan umum di tingkat kecamatan di bidang perizinan, non perizinan dan administratif lain sesuai dengan kewenangannya mulai dari penerimaan dokumen/berkas permohonan serta penyampaian kembali dokumen/berkas kepada pemohon;
- c. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas.